

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Kesadaran pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan saat ini semakin tinggi, hal ini tentu terkait dengan tantangan abad ke-21 terhadap dunia pendidikan di Indonesia yang semakin berat. Menurut Yaumul C.A. Achir (1997: 118) bahwa, “Lembaga pendidikan harus mengemban tugas menciptakan manusia baru Indonesia yang sadar dan menguasai IPTEK, IMTAQ, dan etika”. Pemikiran ini sangat logis mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan antara lain dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan *ilmu pengetahuan* dan *teknologi*. Selain bermanfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era Persaingan global, yang merupakan ciri abad ke-21.

Uraian diatas juga menggambarkan bahwa *ilmu pengetahuan* dan *teknologi*, keterampilan, keahlian, kemahiran yang memberi bobot kepada *output* pendidikan segera mungkin untuk diberi prioritas.

Pada masa lampau, yaitu sebelum Pelita V, kebijakan pendidikan lebih mengarah pada laju peningkatan pemerataan yang *cepat* tetapi mutu *rendah*. Sejak Pelita V diusahakan untuk berubah ke laju peningkatan pemerataan *rendah* tapi mutu *tinggi*. Untuk kondisi sekarang ini tentu yang terbaik adalah mempercepat keduanya, jumlah anak didik harus sebanyak mungkin ditingkatkan hingga angka

partisipasi semakin tinggi dan merata. Sedangkan mutu pendidikan harus terus menerus berkembang. Dilema antara kuantitas dan kualitas harus segera dipecahkan, sementara relevansi dan efisiensi harus makin diutamakan.

Peningkatan *kualitas* pendidikan merupakan proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha *pembangunan pendidikan* yang lebih berkualitas antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya. Namun secara empiris upaya pemerintah tersebut belum cukup *signifikan* dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu indikator kurangberhasilan ini ditunjukkan antara lain dengan NEM siswa untuk berbagai mata pelajaran pada jenjang SLTP dan SLTA yang tidak memperlihatkan kenaikan yang berarti bahkan dapat dikatakan konstan dari tahun ke tahun, kecuali untuk beberapa sekolah yang jumlahnya relative kecil.

Menurut Umaedi (1999:2) bahwa ada dua faktor yang menyebabkan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil, yaitu:

Pertama, strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *input-oriented*. Strategi yang dimaksud lebih bersandar kepada asumsi bilamana semua input pendidikan telah terpenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan akan dapat menghasilkan *output* yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. *Kedua*, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro-oriented* diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di

tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah).

Pendapat diatas memberikan pemahaman bahwa pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan tetapi juga harus memperhatikan faktor proses pendidikan. Input pendidikan merupakan hal yang mutlak harus ada dalam batas-batas tertentu, tetapi tidak menjamin dapat secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan. Disamping itu mengingat sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam, kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, maka sekolah harus dinamis dan dinamis dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini akan dapat dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai keragamannya itu, diberi kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didiknya. Walaupun demikian, agar mutu tetap terjaga dan proses peningkatan mutu tetap terkontrol, maka harus ada standar yang diatur dan disepakati secara nasional untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan peningkatan mutu tersebut. Dalam hal ini, para ahli berupaya melakukan penyelidikan untuk menemukan pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu pendidikan di masa mendatang dengan melalui basis sekolah sebagai institusi paling depan dalam kegiatan pendidikan. Pendekatan ini, kemudian dikenal dengan *manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah*.

Kajian peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah (*School Based Quality Management*), merupakan konsep yang menawarkan kerjasama yang erat

antara sekolah, masyarakat dan pemerintah dengan tanggung jawab masing-masing ini, berkembang didasarkan keinginan pemberian kemandirian kepada sekolah untuk ikut terlibat secara aktif dan dinamis dalam rangka proses peningkatan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sumber daya sekolah yang ada.

③* Dalam kaitannya dengan uraian diatas Umaedi (1999:4) menyatakan bahwa: “sekolah harus mampu menterjemahkan dan menangkap esensi kebijakan makro pendidikan serta memahami kondisi lingkungannya (kelebihan dan kekurangannya) untuk kemudian melalui proses perencanaan, sekolah harus memformulasikannya ke dalam kebijakan mikro”. Dalam hal ini sekolah harus mampu membuat program-program prioritas yang harus dilaksanakan dan dievaluasi oleh sekolah yang bersangkutan sesuai dengan visi dan misinya masing-masing. Target utamanya yaitu menentukan target mutu yang ingin dicapai dalam setiap kurun waktu.

Konsep diatas, oleh beberapa sekolah sebenarnya telah diujicobakan, termasuk di SMU Negeri 2 Watampone Propinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan studi eksplorasi di sekolah tersebut, bahwa upaya memberikan pelayanan peningkatan mutu pendidikan telah berjalan hampir tiga tahun, namun dilihat dari segi indikator hasil Nilai Ebtanas Murni (NEM) siswa. Data sementara yang penulis peroleh NEM siswa SMU Negeri 21 Bandung pada tahun ajaran 1996/1997 untuk program studi IPS diperoleh nilai rata-rata 5,29 dan untuk program studi IPA diperoleh nilai rata-rata 4,86. Pada tahun pelajaran 1997/1998 pada program studi IPS diperoleh nilai rata-rata 4,97 dan program studi IPA

diperoleh nilai rata-rata 4,43. Sedangkan pada tahun pelajaran 1998/1999 diperoleh nilai rata-rata untuk Program Studi IPS sebesar 4,42 dan untuk program studi IPA diperoleh nilai rata-rata 4,41.

Fenomena diatas tampak adanya masalah, pada satu sisi sekolah telah melakukan upaya meningkatkan pelayanan mutu pendidikan berbasis sekolah, namun pada sisi lain hasil belajar siswa diukur dari indikator NEM tidak menunjukkan hasil yang optimal. Masalah tersebut perlu adanya kajian yang mendalam dengan pendekatan ilmiah, dengan cara menganalisis variabel-variabel yang diduga kuat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa di SMU Negeri 2 Watampone Propinsi Sulawesi Selatan.

B. Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, diperoleh gambaran tentang pentingnya usaha-usaha pelayanan peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada basis sekolah, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap keberhasilan sekolah yang antara lain meningkatnya hasil NEM siswa. Namun demikian, upaya memberikan pelayanan yang bermutu tidak terlepas dari fasilitas dan kompetensi guru yang langsung berkaitan dengan kebutuhan belajar siswa.

Untuk memperoleh gambaran yang valid dan reliabel tentang pelaksanaan pelayanan mutu pendidikan berbasis sekolah dan hasil NEM siswa SMU Negeri 2 Watampone Propinsi Sulawesi Selatan, maka penelitian ini akan menganalisis Bagaimana hubungan antara program pelayanan peningkatan mutu pendidikan

berbasis sekolah dengan hasil NEM siswa di SMU Negeri 2 Watampone Propinsi Sulawesi Selatan.

Agar pembahasan ini terarah, maka penulis perlu melakukan perumusan masalah secara spesifik dan berkesinambungan, yaitu *“Bagaimana pola hubungan antara program mutu pelayanan pendidikan berbasis sekolah dengan hasil belajar siswa di SMU Negeri 2 Watampone Makassar Propinsi Sulawesi Selatan?”*. Pertanyaan ini selanjutnya terbagi atas dua pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara fasilitas pendidikan dalam program mutu pelayanan pendidikan berbasis sekolah dengan hasil belajar siswa di SMU Negeri 2 Watampone Propinsi Sulawesi Makassar Selatan?
2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi guru dalam program mutu pelayanan berbasis sekolah dengan hasil belajar siswa di SMU Negeri 2 Watampone Makassar Propinsi Sulawesi Selatan?

C. Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini dapat dirumuskan dua hipotesis penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara fasilitas pendidikan dalam program mutu pelayanan berbasis sekolah dengan hasil belajar siswa di SMU Negeri 2 Watampone Makassar Sulawesi Selatan.

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi guru dalam program mutu pelayanan pendidikan berbasis sekolah dengan hasil belajar siswa di SMU Negeri 2 Watampone Makassar Sulawesi Selatan.

D. Kerangka Berpikir Penelitian

Pelayanan dalam ilmu ekonomi tergolong pada jenis kegiatan jasa. Philip Kotler (1997: 83) menyatakan bahwa, “pelayanan adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak atau pihak lain dan pada dasarnya tidak terwujud, serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Produk produksinya mungkin atau mungkin juga tidak dikaitkan dengan sesuatu produk fisik”. Selanjutnya Philip Kotler (1997: 83) memberikan konsep perbandingan tentang pelayanan dengan barang, yang menurutnya memiliki empat ciri, yaitu: (a) jasa tidak dapat dirasakan sbelum dibeli oleh nasabah, (b) proses operasi jasa harus bersamaan waktunya dengan saat pemakaian nasabah, (c) unsur jasa sangat bervariasi, dan (d) jasa tidak dapat disimpan. Dari pendapat tersebut diperoleh pemahaman bahwa ciri-ciri pemasaran jasa atau pelayanan sangat berbeda dengan pemasaran barang.

Pendapat lain tentang konsep pelayanan dikemukakan oleh Zithaml, Berry dan Parasuraman (1990: 42) bahwa terdapat 5 dimensi pokok yang berkaitan dengan pelayanan, yaitu: (1) bukti langsung (tangibles) yang meliputi: fasilitas fisik perlengkapan pegawai dan sarana komunikasi, (2) keandalan (reliability) yaitu berkaitan dengan kemampuan memberikan pelayanan dengan akurat dan memuaskan, (3) daya tanggap (responsiveness) yaitu keinginan para karyawan /

personil untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan secara tanggap, (4) jaminan (assurance) yaitu mencakup pengetahuan dan kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya serta bebas dari resiko atau bahaya dan keraguan bagi pelanggan, dan (5) empathy, yaitu dimensi yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, memberikan perhatian secara pribadi dan memahami kebutuhan para pelanggan.

Program pelayanan dalam kegiatan pendidikan dikenal dengan istilah layanan bimbingan (*Guidance Services*). Para ahli pendidikan mendefinisikan pelayanan bimbingan dengan cara yang bervariasi, namun selalu menunjukkan kepada hakekat, tujuan dan prosedur yang serupa. Dalam hal ini Abin Syamsuddin Makmun (1998: 188) memberikan pengertian pelayanan bimbingan sebagai berikut:

- 1) *Pelayanan bimbingan (guidance services)* merupakan bantuan yang diberikan kepada individu tertentu.
- 2) Agar yang bersangkutan dapat mencapai *taraf perkembangan* dan *kebahagiaan* secara optimal,
- 3) Lingkungannya dengan melalui proses pengenalan, pemahaman, penerimaan, pengarahan, perwujudan, serta penyesuaian diri, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.

Menurut Robson (1996: 1-6) bahwa setiap siswa sebenarnya potensial untuk menghadapi masalah (baik disadari maupun tidak). Sampai batas tertentu mungkin mereka dapat menyelesaikan sendiri tanpa memerlukan pelayanan orang lain. Atau, memang tidak mampu menyadari bahwa ia sesungguhnya memerlukan bantuan orang lain.

Pelayanan dalam kegiatan pendidikan tentu memiliki tujuan. Menurut Mortenseen dan Schmuller (1996: 6-8) bahwa tujuan atau sasaran akhir yang

hendak dicapai oleh pelayanan yaitu identik dengan tujuan pembelajaran, yaitu tercapainya tingkat perkembangan individu secara optimal, sesuai dengan abilitas, minat, dan kebutuhan-kebutuhannya.

Program pelayanan peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah memuat rencana detail yang merupakan kegiatan atau tugas operasional sekolah. Dalam hal ini meliputi: (a) program fasilitas pembelajaran yang dibutuhkan siswa dan guru, dan (b) kompetensi guru sebagai pelayan siswa. Kompetensi guru sebagai pelayan siswa dalam proses pembelajaran ini meliputi: kompetensi kognitif, kompetensi afektif dan kompetensi psikomotor.

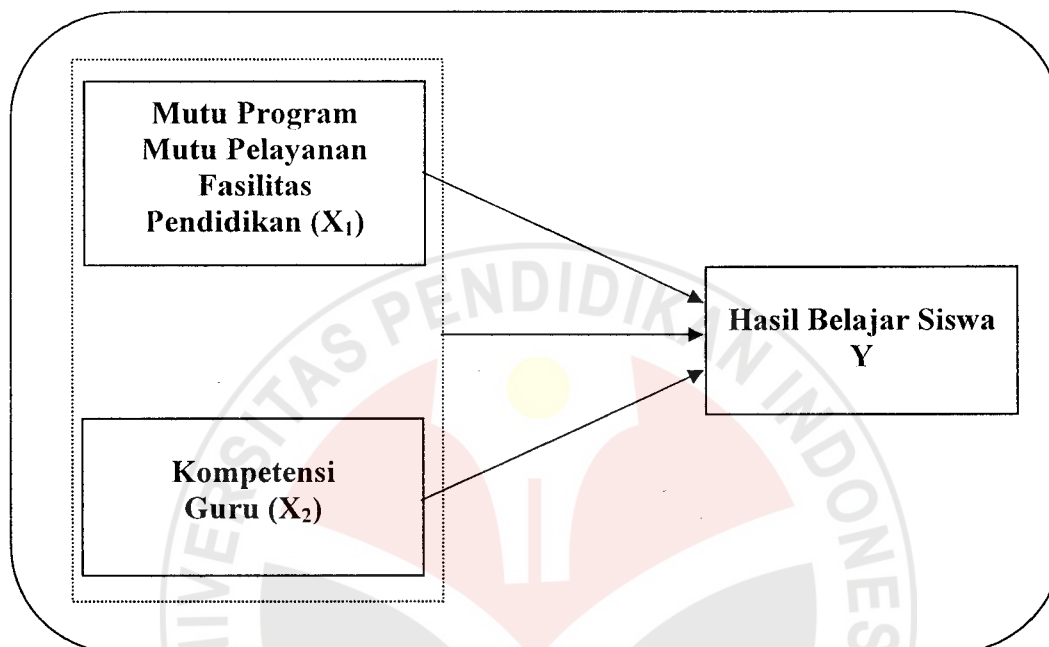
Kerangka kerja dalam manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah, diharapkan sekolah dapat bekerja dalam koridor-koridor tertentu antara lain; (a) sumber daya, sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan setempat. Selain pembiayaan operasional (administrasi), pengelolaan keuangan harus ditujukan untuk: (i) memperkuat sekolah dalam menentukan dan mengalokasikan dana sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan untuk proses peningkatan mutu, (ii) pemisahan antara biaya yang bersifat akademis dari proses pengadaannya, dan (iii) pengurangan birokrasi pusat; (b) pertanggungjawaban, sekolah dituntut untuk memiliki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Hal ini merupakan perpaduan antara komitmen terhadap standar keberhasilan dan harapan/tuntutan orang tua. Pertanggungjawaban ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana masyarakat dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan jika mungkin



untuk meyakinkan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan oleh kurikulum, berdasarkan kurikulum standar yang telah ditetapkan secara nasional, sekolah bertanggungjawab untuk mengembangkan kurikulum baik dari standar materi (content) dan proses penyampaiannya. Pengembangan kurikulum tersebut harus memenuhi kebutuhan siswa, untuk melihat progres pencapaian kurikulum, siswa harus dinilai melalui proses tes yang dibuat berdasarkan standar nasional dan mencapai berbagai aspek kognitif, affektif dan psikomotor maupun aspek psikologi lainnya. Proses ini akan memberikan masukan ulang secara obyektif kepada orang tua mengenai anak mereka (siswa) dan kepala sekolah yang bersangkutan maupun sekolah lainnya mengenai performan sekolah sehubungan dengan proses peningkatan mutu pendidikan; dan (d) personil sekolah, sekolah bertanggungjawab dan terlibat dalam rekturmen (dalam arti penentuan jenis guru yang diperlukan) dan pembinaan staf struktur sekolah. Kebutuhan guru yang memiliki kompetensi profesionalisme sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada siswa dalam proses pembelajaran.

Uraian diatas menggambarkan bahwa program pelayanan mutu pendidikan disekolah cukup luas. Dalam penelitian ini penulis hanya mengambil dua sub variable yang diduga mempengaruhi terhadap keberhasilan NEM siswa (Y). Sub variable independent tersebut yaitu: (1) fasilitas pendidikan yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran (X_1), dan (2) kompetensi guru dalam memberikan pelayanan kepada siswa (X_2). Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data NEM siswa diperoleh melalui studi dokumen hasil Ebtanas tahun pelajaran 1996/1997 – 1998/1999. Sedangkan untuk memperoleh data program pelayanan

peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah, penulis menyebarkan kuisioner yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Untuk itu paradigma dalam penelitian ini penulis gambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Model Hubungan antara Beberapa Variabel Mutu Pelayanan Pendidikan Berbasis Sekolah dengan Hasil Belajar Siswa

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh dan mendapatkan data serta informasi tentang program pelayanan peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah dan hasil NEM siswa. Kemudian data dan informasi tersebut diklasifikasikan, dianalisis dan diinterpretasikan, sehingga akhir penelitian ini dapat mendeskripsikan sekaligus menjelaskan sejauh mana hubungan program pelayanan peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah dengan hasil NEM siswa di SMU Negeri 2 Watampone Propinsi Sulawesi Selatan.

Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi diatas, dan maksud penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui gambaran empirik hubungan antara program mutu pelayanan pendidikan berbasis sekolah dengan hasil belajar siswa di SMU Negeri 2 Watampone Makassar Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui gambaran empirik hubungan antara fasilitas pendidikan dalam program mutu pelayanan pendidikan berbasis sekolah dengan hasil belajar siswa di SMU Negeri 2 Watampone Makassar Propinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui gambaran empirik hubungan antara kompetensi guru dengan hasil belajar siswa di SMU Negeri 2 Watampone Makassar Propinsi Sulawesi Selatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan manajemen pendidikan di lingkungan SMU dan keberhasilan belajar siswa dengan menerapkan konsep Manajemen Berbasis Sekolah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat membantu menjelaskan strategi penerapan manajemen mutu pendidikan berbasis sekolah dengan memperhatikan kajian manajemen pendidikan, khususnya di era pelaksanaan Otonomi Daerah. Bagi

kepala sekolah, pengetahuan dan pemahaman tentang manajemen pendidikan berbasis sekolah sangat penting. Karena dengan mengetahui teknik manajemen dan penerapannya di sekolah, maka akan digunakan strategi pengelolaan lembaga pendidikan yang tepat bagi setiap jenjang pendidikan dalam hal ini SMU Negeri 2 Watampone Makassar Sulawesi Selatan. Temuan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran tentang factor-faktor yang menyebabkan keberhasilan belajar siswa.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini berjudul: “**Manajemen Program Mutu Pelayanan Pendidikan Berbasis Sekolah Dengan Hasil Belajar Siswa Di SMU Negeri 2 Watampone Makassar Propinsi Sulawesi Selatan** (*Studi Tentang Hubungan Antara Fasilitas Pendidikan dan Kompetensi Guru Dengan Hasil Belajar Siswa*)”.

Tesis ini disusun dalam lima bab, setiap babnya secara garis besar memuat sebagai berikut:

Bab Pertama, mengungkap hal-hal yang menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Uraian tersebut mencakup: latar belakang masalah, permasalahan dan pertanyaan masalah, paradigma penelitian, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab Kedua, dalam bab ini diuraikan berbagai kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan yang di teliti, yaitu tentang Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah Dalam Upaya Peningkatan Pembelajaran.

Bab Ketiga, Metodologi Penelitian, dalam pembahasannya diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan, Desain Penelitian, Operasional Variabel, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

Bab Keempat, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam uraiannya dijelaskan tentang: Deskripsi obyek penelitian, Program pelayanan pendidikan berbasis sekolah, dan pembahasan.

Bab Kelima, membahas kesimpulan, implikasi dan rekomendasi. Kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.



